

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Angka kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun masih tetap menjadi isu penting, yaitu dengan rasio kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03 persen dan di perkotaan 6,73 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat di wilayah rural masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding kawasan urban. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi kompleks.

Data BPS juga menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan pada September 2024 mencapai 4,02 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 180,20 ribu orang. Walaupun terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, angka kemiskinan di Kalimantan Selatan tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Amuntai Utara yang secara umum masih memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.

Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat serta mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat, yang juga dikenal di dunia sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan dana PKH yang diberikan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua KPM bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai lansia 60 tahun dan ibu hamil, menyusui, nifas terdapat anak yang berusia 0-6 tahun, anak SD, SMP, SMA atau sederajat dan anak yang berusia 6-21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tujuan PKH dalam jangka pendek ialah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan pemerintah sebagai program yang mampu

memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, anak usia 0-6 tahun dan anak SD, SMP, SMA sederajat dan anak usia 6-21 yang belum menuntaskan wajib belajar, dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.

Secara ideal, pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan efektif, yaitu tepat sasaran, dimanfaatkan sesuai tujuan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas program ini belum sepenuhnya optimal

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapati permasalahan yang muncul pada salah satu kebijakan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada beberapa fenomena yang peneliti dapati saat observasi awal, yaitu:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih adanya keluarga yang tergolong kurang mampu namun belum menerima bantuan PKH. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu namun masih terdaftar sebagai penerima. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat sekitar 3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara kondisi ekonomi

tergolong mampu namun masih menerima bantuan PKH. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan pembaruan data penerima belum berjalan secara optimal sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

2. Bantuan PKH belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan program. Bantuan PKH seharusnya digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Sesuai dengan kewajiban KPM PKH, bantuan tersebut digunakan untuk keperluan seperti pembelian perlengkapan sekolah (buku, seragam, alat tulis), pembayaran kebutuhan pendidikan anak, serta untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil, balita, dan anggota keluarga lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal, dari sejumlah data yang diperoleh terdapat sekitar 5 KPM yang menggunakan bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, sebagian masyarakat menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan lain seperti membeli kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, bahkan untuk keperluan di luar pendidikan dan kesehatan.
3. Pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagaimana ketentuan umum pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan P2K2 masih dilakukan secara tidak menentu dan menyesuaikan kondisi di lapangan, sehingga penyampaian informasi, edukasi, dan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum berjalan secara

konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan pemahaman penerima manfaat terhadap program. Padahal, kegiatan P2K2 memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada KPM mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan, penggunaan bantuan sesuai tujuan program, serta mendorong perubahan pola pikir dan perilaku keluarga ke arah yang lebih mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka peneliti menyesuaikan menggunakan teori dari Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama berkaitan dengan efektivitas program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memahami efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) serta melatih kemampuan berpikir ilmiah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan bantuan sosial secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan topik serupa.